

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu

R.Nelly & Adrianus (2010) tentang pengaruh system akuntabilitas keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten bandung. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan positif antara system akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,462 dimana lebih kecil dari 0.05.

Nurhayati (2014) tentang pengaruh penerapan system akuntansi keuangan daerah dan aktifitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat keeratan hubungan kualitas system akuntabilitas keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan memiliki tingkat hubungan yang signifikan positif .

Syarifudin (2014), pengaruh kompetensi SDM dan peran auditing interen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variable dependen sistem pemngendalian interen pemerintah(studi empiris pemkab kabupaten), dimana memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDA, peran auditing , pengaruh sip, berpengaruh terhadap LKPD ,serta menunjukkan hasil bahwa ada kesesuaian antara variabel, karena nilai CR >2,00 dimana nilai tersebut menunjukkan kesesuaian .

Roviate, D. (2011), pengaruh sumber daya manusia dan penerapan system akuntabilitas keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan

daerah (kab tasikmalaya), dimana penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui kompetensi SDM, penerapan system akuntabilitas, kualitas laporan pada dinas terkait, serta dari penelitian dengan menggunakan 15 responden didapat hasil bahwa tanggapan responden terhadap kualitas laporan sangatlah baik ini di tunjukan dengan nilai yang diperoleh .

Lesi (2015), competence of human resource, the benefits of information technology on value of financial reporting in indonesia. Hasil penelitian bedasar uji statistic diperoleh nilai t hitung 5,677 dan nilai value 0,000 dimana nilai tersebut lebi kecil dari 0,05. Kesimpulanya competence of human resource berpengaruh signifikan positif terhadap benefits of information technology on value of financial reporting in Indonesia.

Nurmiawati dkk, (2017) Effect of human resource kompetensi, information technology and internal control systems on good governance and local government financial management performance. Hasil yang didapat adalah effect of human resource, information technology and internal control berpengaruh signifikan positif terhadap local government financial management performance.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu, penggabungan anatar variabel besas, tempat penelitian dan sampel yang diambil lebih berfokus pada satu instansi, yaitu Badan Keuangan Daerah.

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Kompetensi Aparatur

Kopetensi aparatur dilihat dari kualitasnya, adalah kemampuan seseorang atau individu dari suatu instansi atau lembaga, dimana sistem tersebut dipergunakan untuk menjalankan suatu fungsi-fungsi dan wewenang guna tercapainya tujuan yang efektif serta efisien. Kemampuan aparatur harus dilihat sebagai kapasitas/ kualitas untuk mencapai kinerja yang baik dan menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome). (Keputusan Kepala BKN Nomor: 46a :2007)

Menurut Hevesi, (2005) Kompetensi yaitu dimana suatu karakteristik dari individu yang didalam dirinya memiliki keterampilan, kemampuan, serta pengetahuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut beberapa pakar, kopetensi merupakan kepribadian dari seseorang yang dipergunakan sebagai dasar untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi dalam menjalankan pekerjaanya. Sedangkan untuk pegawai yang tidak mempunyai kompeten yang cukup, dalam menjalankan tugasnya akan tersendat- sendat dan berakibat pada pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Menurut Nurillah (2014), kemampuan seseorang dapat terlihat dari seberapa baiknya dia dalam menjalankan suatu kegiatan yang mana kegiatan tersebut bersifat spesifik contoh: mengimplementasi suatu strategi bisnis , cara dia berkomunikasi, mengoprasikan peralatan berbasis TI. Menurut Dunnetts

dalam Nurillah skill perlukan dalam mengerjakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari pelatihan serta pengalaman yang didapat .

Menurut Baldrice (2015:107) diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten agar dapat menerapkan akuntansi pemerintah berbasis aktual. Aparatur yang memiliki disiplin ilmu akuntansi saja tidak cukup, tetapi mereka harus dilatih agar mampu beradaptasi terhadap pengetahuan akuntansi pemerintah dimana berbeda dengan akuntansi komersial.

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan kumpulan dari beberapa prosedur yang dijadikan satu dokumen. Prosesnya meliputi pengumpulan data, pencatatan, memeriksa setiap data keuangan, sampai dengan membuat laporan keuangan, dimana laporan tersebut dibuat sebagai pertanggungjawaban dari APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Menurut Halim, A. (2013:35). Akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah, merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

Berbeda dengan Halim, menurut Nordiawan, D. (2006:35) akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengalisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang

menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Menurut Baldric (2015:107) system akuntansi, merupakan pemantau untuk penerapan standart akuntansi pemerintah yang berbasis aktual. Akutansi pemerintah sulit diterapkan apabila tidak dibantu oleh system informasi berbasis akuntansi.

Menurut Nuramalia. (2017:51), Sistem akuntansi keuangan daerah. kumpulan prosedur manual ataupun terkomputerisasi mulai pengumpulan data , pencatatan , pengihtisaran , sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan oprasi keuangan pemerintah dalam bentuk laporan/LKPP.

3. Pengawasan Interen

Pengawasan Interen merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan. Pengawasan intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin kevalitan dalam laporan pertanggungjawaban, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Dilihat dari tujuan tersebut, maka pengawasan intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Pengawasan intern akuntansi

Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi.

Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

b. Pengawasan administratif

Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contoh, adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Pengawasan interen merupakan suatu langkah pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar , pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel, dan transparan. Wilkinson et al.,(2000) Menyebutkan sub komponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah: (1) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen serta catatan bernomor; (2) pemisahan tugas; (3) otorisasi yang memadai atas transaksi; (4) pemeriksaan independen atas kinerja; dan (5) penilaian yang sesuai atau tepat atas jumlah yang dicatat.

Menurut Baldrick (2015:107) Pengawasan interen merupakan pengawasan yang berada dalam lingkungan organisasi yang diawasi. Pengawasan yang dilakukan oleh BPK dan inspector wilayah termasuk dalam jenis pengawasan interen.

Menurut Amin (2016:31) Pengawasan interen, memberikan keyakinan, kepada direktur bahwa seluruh staf termasuk para supervisor, telah melaksanakan laporan dengan benar. Penelaahan ini juga dilaksanakan untuk

memberikan keyakinan khusus, pada penugasan tertentu, bahwa pernyataan audit yang dikeluarkan adalah akurat, dan dapat dipercaya.

4. Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan catatan berisi informasi pada periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu instansi. Berdasarkan UU Nomor.17 Tahun 2003, tentang keuangan Negara pemerintah pusat maupun daerah harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu dinyatakan pula dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan pemendagri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Halim,A. (2013:19) keuangan daerah secara sederhana dirumuskan sebagai semua hak dan kewajiban, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang atau barang dapat dijadikan sebagai kekayaan sepanjang belum dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Mardiasmo (2018:27) bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban.

Bambang,dkk. (2017:41) laporan keuangan merupakan perwujudan pertanggungjawaban pemerintah, atas penggunaan dana daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dan peyelenggaraan oprasional pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah. Nomor 24 tahun 2005 yang mana telah diperbahruai dengan PP. Nomor 71 Tahun 2010, tentang standat akuntansi pemerintah menyebutkan, bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh satuan entitas pelaporan.

C. Teori Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Aparatur merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompentensi tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011).

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kualitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), di samping

pengembangan kapasitas organisasi (Anggraeni, 2014: 8)

2. Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Sistem akuntabilitas keuangan daerah merupakan faktor terpenting dalam pembuatan akuntabilitas keuangan daerah. Dimana system akuntabilitas yang lemah akan mengakibatkan kurang handal dan relevannya laporan keuangan yang dihasilkan. (Mardiasmo, 2018, 179)

Agar dapat menyediakan laporan keuangan yang aktual dibutuhkan suatu system yang dapat dipergunakan dalam rangka penyediaan informasi serta pengolahannya. (Halim, A.:2013.37)

Undang – Undang Nomor ,17 Tahun 2013 pasal 23 tentang keuangan Negara dimana disebutkan bahwa bentuk serta isi dari laporan pertanggungjawaban, pelaksanaan APBN / APBD disusun, dan disajikan sesuai dengan Sistem Akuntan Pemerintah.

Pengaplikasian SAKD dengan sistem, “*double entry*” ditinjau untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih mudah untuk dilakukan audit, dan pencarian bukti transaksi, catatan, keberadaan kekayaan, utang serta ekuitas organisasi. Hal ini merupakan faktor utama untuk menghasilkan akuntabilitas keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan ke public. Mahmudi (2009:07).

3. Hubungan Sistem Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas

Keuangan Daerah.

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011)

Peraturan Pemerintah Nomor.6 Pasal 1 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Interen menyebutkan seluruh proses kegiatan auditing, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan laporan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan.

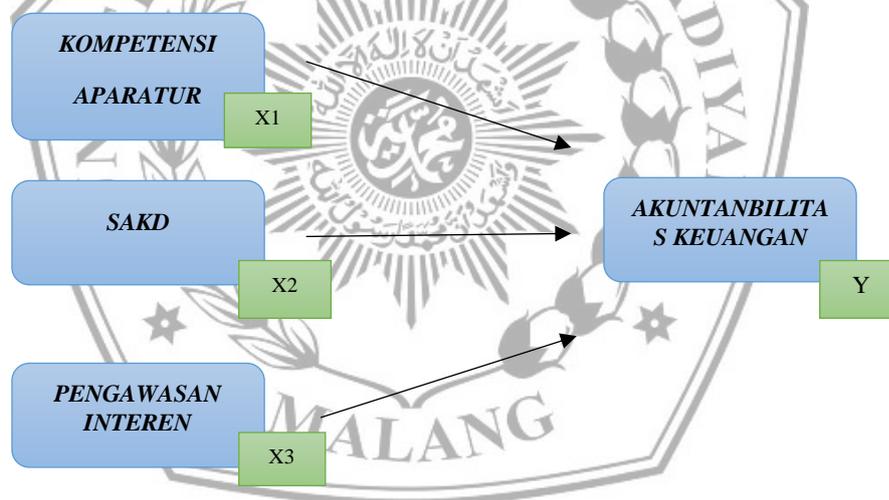
Kegagalan organisasi dalam membuat laporan pertanggungjawaban, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terjadi karena adanya kelemahan atau kegagalan pada salah satu atau beberapa tahapan dalam proses pengawasan. (Mardiasmo.2018.55)

Untuk menjamin dilakukannya laporan pertanggungjawaban oleh lembaga-lembaga pemerintahan maka diperlukan perluasan system pengawasan interen (*financial, compliance, and performance audit*). (Sawanda,2013,31)

D. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan dengan variabel bebas yaitu kompetensi aparatur, sistem akuntansi pemerintah daerah (SAKD), dan sistem pengendalian intern.

Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada model berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis:

Berdasarkan pada tinjauan teori serta penelitian terdahulu, dapat dinyatakan hipotesa sebagai berikut:

H1: diduga kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kota Batu.

H2: diduga penerapan SAKD berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kota Batu.

H3: diduga pengawasan interen berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kota Batu.

